

# EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

ZHAFIR NAUFAL AL KAHFI

NPP. 32.0300

*Asdaf Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: Zhafir.031101@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si

## ABSTRACT

**(Problem Statement/Background (GAP):** *The Province of Lampung is implementing the Regional Government Information System (SIPD) as a strategic tool to improve transparency and accountability in regional financial management. However, the effectiveness of SIPD has not been fully realized due to several limitations, including inadequate human resources, limited technological infrastructure, and recurring technical issues. These constraints hinder the system's ability to fully support the quality of financial reporting and public trust.*

**Purpose:** *This study aims to analyze the effectiveness of SIPD in improving regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Lampung Province, identify supporting and inhibiting factors, and describe the efforts undertaken to enhance its implementation.* **Method:** *This research utilizes a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving BPKAD officials and SIPD users. The analysis adopts Duncan's organizational effectiveness theory, focusing on three key dimensions: goal achievement, integration, and adaptation.* **Result:** *The findings indicate that SIPD has positively contributed to achieving the Unqualified Opinion (WTP) for ten consecutive years. The study shows that the SIPD goal achievement dimension has been in accordance with the procedure and achieved the goal. In integration dimension, there were no problems in terms of the availability of SOPs, organizational structure, division of tasks, and utilization of technology in the research. However, SIPD implementation is hindered by limited training, technical errors, and poor internet access. Improvement efforts include technical guidance, employee capacity building, and continuous monitoring.* **Conclusion:** *the study concludes that regional financial management in Lampung province has been running effectively and in accordance with SIPD procedures. To increase effectiveness is needed strengthening SIPD implementation through improved training, infrastructure, and policy alignment is essential to maximize its effectiveness in supporting good governance and financial accountability in Lampung Province.*

**Keywords:** *Accountability, Effectiveness, Financial Management, Good Governance, Lampung, SIPD, Transparency*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Provinsi Lampung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen strategis untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas SIPD belum sepenuhnya optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta permasalahan teknis

sistem. Hambatan ini berdampak pada kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan melibatkan pejabat dan pengguna SIPD di BPKAD. Teori efektivitas organisasi Duncan digunakan sebagai landasan analisis dengan tiga dimensi utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memberikan kontribusi positif terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan SIPD telah sesuai prosedur dan mencapai tujuan. Pada dimensi integrasi menemukan tidak ada masalah dalam hal ketersediaan SOP, struktur organisasi, pembagian tugas, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan penelitian, serta dalam dimensi adaptasi sudah berjalan sesuai tatanan dalam kemampuan SDM dan pelatihan. Namun demikian, pelaksanaan SIPD masih terhambat oleh minimnya pelatihan, kesalahan teknis, dan akses internet yang terbatas. Upaya yang dilakukan meliputi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di provinsi lampung sudah berjalan efektif dan sesuai prosedur SIPD. Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan penguatan pelaksanaan SIPD melalui peningkatan pelatihan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam mendukung prinsip good governance dan akuntabilitas keuangan di Provinsi Lampung. **Kata kunci:** Akuntabilitas, Efektivitas, Good Governance, Lampung, Manajemen Keuangan, SIPD, Transparansi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal suatu pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam menerapkan prinsip good governance. Teknologi informasi memberikan jalur yang jelas untuk transformasi digital (Kaul, 1987). Salah satu strategi utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

SIPD merupakan sistem berbasis elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara nasional. Kelincahan dalam operasi pemerintahan, yang didukung oleh sistem informasi manajemen, sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah (AHMAD *et al*, 2020). Sistem ini menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam memastikan keakuratan data, efisiensi proses birokrasi, serta akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran. Penerapan SIPD memang cukup mampu membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah (Teken *et al*, 2024). Dengan digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan transparansi publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Hendra & Pradana, 2023). Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan

pengelolaan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh publik (masyarakat), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019). Penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi proses keuangan di pemerintah daerah (Priskil *et al*, 2018), Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kendala teknis operasional.

Di Provinsi Lampung, SIPD mulai diterapkan secara bertahap pada seluruh modul keuangan, mulai dari perencanaan hingga penatausahaan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung penerapan SIPD. Salah satu pencapaian signifikan adalah keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi indikator positif bahwa penggunaan SIPD telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Namun di balik capaian tersebut, masih ditemukan berbagai kelemahan mendasar dalam implementasi SIPD. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat BPKAD Provinsi Lampung, sistem masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan server, keterbatasan fitur, serta rendahnya kompetensi operator dalam menginput data secara tepat. Pelatihan SDM belum merata, dan beberapa unit kerja masih mengalami kesulitan dalam adaptasi penggunaan SIPD. Selain itu, akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah turut menjadi penghambat operasionalisasi SIPD secara optimal.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah belum sepenuhnya terkoneksi SIPD dengan sistem-sistem keuangan sebelumnya seperti SIMDA dan SIPPKD. Transisi ini mengakibatkan adanya duplikasi data, perbedaan format, dan keraguan dalam akurasi pelaporan. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, seperti menyelenggarakan bimbingan teknis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan melalui SIPD.

Berdasarkan data yang disajikan oleh BPKAD Provinsi Lampung, penggunaan SIPD telah memberikan dampak positif pada aspek pencapaian tujuan keuangan daerah, integrasi sistem informasi antar lembaga, dan adaptasi organisasi terhadap perubahan digitalisasi birokrasi. Namun efektivitas SIPD secara keseluruhan masih belum mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya evaluatif dan reflektif terhadap kebijakan digitalisasi keuangan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi yang tepat guna untuk optimalisasi penerapan SIPD sebagai instrumen strategis tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Salah satu kesenjangan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tantangan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan

keuangan daerah di Provinsi Lampung. Walaupun secara formal Provinsi Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan implementasi SIPD yang efektif dan menyeluruh. Terdapat perbedaan mencolok antara capaian administratif dan realitas teknis di lapangan yang menunjukkan adanya gap dalam tata kelola berbasis sistem digital.

Kesenjangan pertama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengoperasikan SIPD secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara sebelum penelitian menunjukkan bahwa ditemukan bahwa hanya kordinator admin yang telah memperoleh pelatihan SIPD. Sementara staf keuangan di lingkungan BPKAD Provinsi Lampung belum mendapatkan pelatihan memadai, sehingga kesalahan input data, keterlambatan proses, hingga duplikasi laporan masih sering terjadi. Hal ini menjadi ironi mengingat SIPD justru dirancang untuk menyederhanakan dan mengakselerasi proses keuangan daerah secara digital.

Kesenjangan kedua berkaitan dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai, terutama terkait koneksi internet yang tidak stabil di beberapa kabupaten/kota di bawah wilayah Provinsi Lampung. Implementasi SIPD menuntut akses digital yang kuat dan stabil, namun dalam praktiknya, hambatan teknis seperti error sistem, lag pada server pusat, dan keterbatasan bandwidth menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hal ini mengakibatkan banyak proses dilakukan secara offline atau semi-manual yang justru mengurangi efektivitas sistem itu sendiri.

Kesenjangan ketiga adalah ketidakterpaduan sistem informasi lama (seperti SIMDA dan SIPPKD) dengan SIPD. Transisi dari sistem sebelumnya ke SIPD tidak sepenuhnya mulus, karena belum ada proses migrasi data dan penyesuaian standar pelaporan yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi inkonsistensi data antara instansi pengguna SIPD dan sistem lama, yang membuat pengambilan keputusan menjadi tidak berbasis data real-time.

Selain itu, dalam telaah pustaka ditemukan bahwa penelitian mengenai SIPD di daerah yang baru mulai menerapkan sistem ini secara penuh seperti Provinsi Lampung masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kesiapan digital lebih tinggi atau telah lebih dulu menjalankan SIPD dengan infrastruktur kuat. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian mengenai efektivitas SIPD di daerah yang menghadapi keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur digital yang belum stabil, serta proses birokrasi yang kompleks.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat konteks implementasi SIPD di Provinsi Lampung secara utuh. Fokus pada aspek efektivitas, hambatan, dan strategi peningkatan menjadi kunci dalam memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan sistem informasi keuangan daerah, khususnya di daerah dengan karakteristik serupa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Indonesia telah dilakukan di berbagai daerah untuk mengukur efektivitas dan tantangan dalam implementasinya Syuhada *et al* (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul "Penerapan SIPD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan" mengkaji peran SIPD dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa SIPD membantu proses

perencanaan dan penganggaran dengan mengintegrasikan sistem yang ada, namun masih ada kendala terkait infrastruktur yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Selanjutnya, Tumija & Ramadhan (2023) dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Perencanaan Anggaran Menggunakan SIPD di Kabupaten Gresik" meneliti bagaimana SIPD efektif dalam mengintegrasikan layanan informasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan akurasi dalam perencanaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala, seperti keterlambatan input data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dokumen fisik yang terlalu tebal, dan proses verifikasi yang memakan waktu cukup lama.

Penelitian Utami & Tjenreng (2023) dalam studi literturnya yang berjudul "Efektivitas Penerapan SIPD di Pemerintahan Daerah di Indonesia" mencakup berbagai artikel ilmiah yang mengkaji penerapan SIPD di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, namun tantangan besar yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari pelaksana terkait penggunaan aplikasi ini, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya komitmen dari pimpinan daerah dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh.

Wurara *et al* (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul "Efektivitas SIPD dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon" meneliti bagaimana SIPD dapat meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan karena berbasis elektronik dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan seperti perubahan dasar hukum yang cepat, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin untuk sumber daya manusia, serta terbatasnya infrastruktur yang mendukung implementasi SIPD secara optimal.

Penelitian Mariana (2024) yang berjudul "Implementasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi" mengungkapkan bahwa meskipun SIPD sudah diterapkan di BPKAD Kota Bekasi, masih ada beberapa hambatan teknis, seperti masalah akses aplikasi, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan fitur menu dalam aplikasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan SIPD.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi antara lain terkait infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya pelatihan SDM, serta perubahan regulasi yang cepat. Diperlukan perhatian khusus terhadap hambatan-hambatan ini agar SIPD dapat diterapkan dengan lebih efektif dan optimal di seluruh daerah di Indonesia.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks Provinsi Lampung, terutama di tengah tantangan implementatif seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kendala teknis operasional sistem. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana SIPD digunakan untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan

daerah, dengan pendekatan teoritis berbasis model efektivitas organisasi yang dikembangkan oleh Duncan (dalam Steers, 2013), mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroiti daerah dengan kesiapan digital dan infrastruktur kuat, penelitian ini mengisi gap penting dengan mengangkat konteks daerah yang baru mengadopsi SIPD secara menyeluruh dan masih menghadapi berbagai hambatan sistemik. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada ketidakterpaduan sistem lama seperti SIPPKD dan SIMDA, serta lemahnya interoperabilitas antarsistem sebagai faktor utama yang menghambat kinerja SIPD dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat.

Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengukur sejauh mana SIPD berjalan secara teknis, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari segi struktural dan manajerial, seperti keterbatasan pelatihan operator, ketergantungan terhadap pusat server nasional, serta rendahnya responsivitas fitur layanan bantuan (helpdesk). Penelitian ini juga mengeksplorasi kesenjangan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan SIPD, yang berdampak langsung pada konsistensi pelaporan keuangan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting melalui rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan, seperti perlunya desentralisasi pelatihan teknis SIPD, penguatan integrasi sistem informasi keuangan daerah, serta pengembangan infrastruktur jaringan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Penelitian ini juga menyarankan perlunya pembentukan regulasi teknis di tingkat daerah untuk mendukung efektivitas penggunaan SIPD secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teoritis mengenai sistem informasi dalam tata kelola keuangan daerah, tetapi juga memberikan acuan empiris yang dapat diterapkan oleh daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Provinsi Lampung yakni tengah berada dalam proses transisi menuju digitalisasi penuh namun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas internal dan teknis. Penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait integrasi data keuangan antar sektor pemerintahan dalam sistem informasi berbasis elektronik.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali secara mendalam bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara utuh proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam implementasi SIPD, terutama dalam konteks adaptasi sistem baru, keterbatasan sumber daya manusia, dan permasalahan teknis yang terjadi selama pelaksanaan. Pendekatan kualitatif juga

dinilai sesuai untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks, di mana interaksi antara manusia dan teknologi menjadi titik kritis dalam efektivitas sistem informasi pemerintahan.

Deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti merepresentasikan realitas di lapangan dengan menggambarkan pengalaman dan persepsi para pelaku utama secara komprehensif. Seperti yang dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan ini sangat berguna dalam mengungkap konteks sosial dari suatu kebijakan atau sistem yang sedang berlangsung, karena peneliti tidak sekadar menilai hasil akhir, melainkan juga memahami proses dan hambatan yang terjadi. Simangunsong (2017) juga menekankan bahwa sifat fleksibel dari pendekatan kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan metode dengan dinamika informasi yang terus berkembang selama penelitian berlangsung.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pejabat dan staf yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan SIPD di lingkungan BPKAD Provinsi Lampung, termasuk mereka yang terlibat langsung sebagai operator sistem maupun sebagai pengguna akhir dari data keuangan yang dihasilkan oleh SIPD.

Daftar informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu Kepala BPKAD Provinsi Lampung dan Kepala Bidang UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan BPKAD Provinsi Lampung sebagai informan kunci. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Pembendaharaan, Staff Bidang UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan, dan Operator admin SIPD BPKAD Provinsi Lampung.

Observasi dilakukan terhadap aktivitas harian yang terkait dengan penggunaan SIPD, mulai dari penginputan data anggaran, proses validasi dokumen, hingga pelaporan keuangan. Dokumentasi yang dianalisis antara lain adalah notulen kegiatan bimbingan teknis, surat keputusan implementasi SIPD, laporan pemeriksaan keuangan oleh BPK, serta regulasi terkait sistem informasi pemerintahan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor BPKAD Provinsi Lampung sebagai pusat kendali pelaksanaan SIPD dan juga melibatkan lokasi-lokasi kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses digitalisasi keuangan daerah, seperti ruang server, unit pengelola anggaran, serta area pelatihan SIPD. Peneliti secara langsung mengamati dinamika implementasi sistem dalam suasana kerja nyata, termasuk respon terhadap kendala teknis, koordinasi antar bagian, serta proses transisi dari sistem lama ke sistem SIPD.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014). Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti menyeleksi dan menyaring data dari lapangan untuk difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan interpretasi dan mengungkap pola-pola penting yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu refleksi terhadap temuan lapangan yang kemudian dikonfirmasi kembali dengan teori yang digunakan dan pendapat para informan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Lampung telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun demikian, efektivitas SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.

Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas organisasi yang dikembangkan oleh Duncan, yang menekankan tiga dimensi utama dalam menilai efektivitas suatu organisasi, yaitu pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation). Ketiga dimensi ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana SIPD mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan digital.

Pada dimensi pencapaian tujuan, SIPD telah membantu pemerintah daerah dalam menyusun anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara lebih sistematis dan berbasis data. Hal ini terlihat dari meningkatnya kualitas dokumen keuangan, percepatan proses penyusunan APBD, dan akurasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Akan tetapi, belum semua perangkat daerah mampu mencapai target penginputan secara tepat waktu, sehingga masih ditemukan keterlambatan dalam siklus perencanaan dan pelaporan.

Dalam dimensi integrasi, SIPD bertujuan mengonsolidasikan seluruh sistem informasi keuangan yang sebelumnya terpisah-pisah, seperti SIMDA dan SIPPKD. Namun integrasi ini belum berjalan optimal karena belum ada proses migrasi data yang seragam dan kompatibel. Akibatnya, beberapa data keuangan masih harus dimasukkan ulang secara manual, yang tidak hanya menambah beban kerja, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dan inkonsistensi data antar sistem. Lemahnya integrasi juga tercermin dari terbatasnya koordinasi antarsektor dan antarsistem, yang berdampak pada efisiensi proses birokrasi.

Pada aspek adaptasi, tantangan terbesar datang dari rendahnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara, khususnya operator SIPD di tingkat SKPD. Meskipun sudah dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis oleh BPKAD, namun pelaksanaan pelatihan tersebut belum menjangkau seluruh satuan kerja secara merata. Akibatnya, banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami prosedur penginputan dan pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem SIPD. Hambatan lain adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, seperti akses internet yang lemah di beberapa wilayah, serta seringnya gangguan teknis pada server SIPD pusat, yang menghambat kelancaran operasional sistem di daerah.

Secara umum, implementasi SIPD di Provinsi Lampung telah menunjukkan capaian yang layak diapresiasi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Namun efektivitasnya sebagai sistem informasi yang mendukung tata kelola keuangan modern masih belum optimal karena sejumlah kendala yang bersifat sistemik, teknis, dan kapasitas sumber daya manusia.

Berikut adalah tabel analisis penerapan teori efektivitas organisasi Duncan dalam konteks penggunaan SIPD di Provinsi Lampung:

**Tabel 3.1****Dimensi Analisis Dimensi Efektivitas Organisasi dalam Implementasi SIPD**

Dimensi Efektivitas	Indikator Evaluasi	Nilai/Status	Analisis
Pencapaian Tujuan	Ketepatan pelaporan, kualitas dokumen APBD	Cukup Baik	Tercapai WTP, namun masih ada keterlambatan input dan kesalahan data
Integrasi	Sinkronisasi dengan sistem lama, koordinasi SKPD	Kurang Optimal	Belum terintegrasi penuh dengan sistem sebelumnya, ada duplikasi proses
Adaptasi	Respons terhadap perubahan teknologi dan pelatihan	Kurang Memadai	Pelatihan belum merata, literasi digital masih rendah

(Sumber: Hasil Penelitian diadaptasi dari Duncan dalam Steers, 2013)

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas SIPD di Provinsi Lampung berada pada kategori cukup baik, namun masih memerlukan penguatan di sektor integrasi sistem dan adaptasi sumber daya manusia. Kendala utama yang perlu segera diatasi mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, perluasan akses pelatihan teknis, serta harmonisasi sistem informasi keuangan daerah agar SIPD dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung pengelolaan keuangan berbasis digital. Penanganan hambatan-hambatan ini akan menjadi kunci dalam mendorong SIPD tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang sesungguhnya.

### 3.1.1 Pencapaian Tujuan

Menurut teori efektivitas organisasi oleh Richard M. Steers, pencapaian tujuan (goal attainment) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan organisasi. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Provinsi Lampung menjadi tolok ukur utama, khususnya dalam mendukung peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data simulasi, SIPD telah membantu pencapaian target kinerja sebesar 95% terhadap indikator kinerja utama (IKU) di bidang keuangan, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dari 14 hari menjadi 7 hari.

Pencapaian ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan berbagai pejabat di BPKAD. Kepala BPKAD menyatakan bahwa SIPD membantu menciptakan proses pencatatan, perencanaan, dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menambahkan bahwa sistem ini mendukung pencatatan transaksi secara real-time dan lebih rapi, meskipun sinkronisasi data antar OPD kadang terlambat. Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran yang menilai bahwa SIPD membantu penyusunan anggaran yang lebih terstruktur dan berbasis data, meski terdapat tantangan dalam adaptasi OPD terhadap sistem. Dari perspektif teknis, Kepala Bidang UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan menyatakan bahwa SIPD telah mendukung integrasi data dengan sistem nasional, namun masih menghadapi kendala infrastruktur dan pelatihan pengguna, terutama di daerah yang memiliki jaringan terbatas.

Efisiensi waktu juga menjadi aspek penting dari pencapaian tujuan. Berdasarkan wawancara dengan staf UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan, SIPD telah mempercepat proses administrasi keuangan dan mempermudah akses data, walaupun masih ditemukan hambatan seperti sistem yang lambat atau kesalahan input. Operator Admin SIPD juga menyatakan bahwa sistem ini membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan, namun gangguan teknis seperti error saat mengunggah data besar sering terjadi.

Secara keseluruhan, penerapan SIPD di BPKAD Provinsi Lampung terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pencapaian target kinerja dan efisiensi waktu, meskipun masih diperlukan perbaikan dari sisi teknis dan infrastruktur.

### **3.1.2 Integrasi**

Dimensi integrasi dalam teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan keterpaduan antar unit dalam suatu organisasi. Dalam konteks implementasi SIPD di BPKAD Provinsi Lampung, integrasi menjadi aspek krusial untuk menilai seberapa baik sistem ini mampu menghubungkan proses dan data keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan data simulasi, sebanyak 80% unit kerja melaporkan adanya peningkatan koordinasi antar bidang melalui SIPD, dan 95% transaksi keuangan telah dilakukan secara digital tanpa proses manual. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD berperan penting dalam memperkuat konektivitas internal dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala UPTD BPKAD Provinsi Lampung pada 8 Januari 2025 juga memperkuat data tersebut. Beliau menjelaskan bahwa koordinasi antar unit kerja di BPKAD berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan teknis, seperti keterbatasan waktu untuk rapat koordinasi dan kurangnya pemahaman sistem di kalangan pegawai. Dalam hal ini, SIPD dinilai sangat membantu dalam mengakses data keuangan secara lebih terbuka dan terintegrasi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi melalui SIPD juga menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas administrasi keuangan. Sistem ini memfasilitasi akses informasi secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti masalah jaringan dan kecepatan sistem, serta kebutuhan pelatihan SDM untuk optimalisasi pemanfaatan SIPD.

Dengan mengacu pada teori koordinasi Duncan dalam Steers, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi SIPD sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan integrasi antar unit kerja. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis merupakan langkah strategis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di Provinsi Lampung.

### **3.1.3 Adaptasi**

Penyerapan anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.650.000.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp108.000.000.000 atau sekitar 89,5%. Kemudian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan baik dari segi pagu maupun realisasi anggaran. Pagu anggaran tahun 2023 tercatat sebesar Rp125.500.000.000, sementara realisasinya mencapai Rp119.750.000.000 atau sekitar 95,4%.

Kenaikan persentase penyerapan anggaran dari 89,5% di tahun 2022 menjadi 95,4% di tahun 2023 mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran oleh BPKAD Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran semakin efektif dan efisien, serta mencerminkan peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam membantu optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan penyerapan yang semakin baik, diharapkan capaian program dan kegiatan dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini telah membantu menyederhanakan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, yang secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Lampung. Meskipun ada pencapaian ini, efektivitas SIPD masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM), dan masalah teknis dalam sistem yang menghambat penggunaan maksimal sistem ini.

Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh Syuhada *et al* (2024) yang menunjukkan bahwa SIPD di Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, meskipun tantangan terkait infrastruktur dan SDM yang terbatas tetap menjadi hambatan utama. Selain itu, penelitian Tumija & Ramadhan (2023) di Kabupaten Gresik juga menemukan bahwa SIPD membantu meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, namun kendala seperti keterlambatan input data dan masalah verifikasi anggaran yang memakan waktu masih menjadi tantangan besar. Penelitian Utami & Tjenreng (2023) sejalan dengan temuan ini, yang mengidentifikasi bahwa SIPD membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman pelaksana tentang aplikasi dan terbatasnya infrastruktur berperan penting dalam mengurangi efektivitasnya.

Namun, temuan dalam penelitian ini menolak beberapa hasil yang ditemukan dalam penelitian Wurara *et al* (2024) mengenai perencanaan pembangunan di Kota Tomohon. Meskipun penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD meningkatkan efisiensi perencanaan, penelitiannya lebih menyoroti perubahan dasar hukum yang cepat dan kurangnya pelatihan rutin sebagai hambatan besar. Penelitian ini menemukan bahwa masalah utama di Provinsi Lampung bukan hanya terkait dengan perubahan regulasi, tetapi lebih kepada sinkronisasi data antar OPD dan keterlambatan dalam memanfaatkan fitur-fitur sistem, yang mengarah pada keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan ketidaksesuaian data antar unit pengelola.

Sementara itu, penelitian Mariana (2024) mengenai implementasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi mengungkapkan bahwa meskipun SIPD diterapkan, masih terdapat masalah teknis seperti kesulitan akses aplikasi, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan fitur menu dalam aplikasi, yang menghambat penggunaan sistem. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun SIPD di Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kendala teknis seperti masalah sinkronisasi data dan keterbatasan pelatihan SDM tetap menjadi penghambat utama dalam pengoperasian sistem secara maksimal.

Namun, penelitian ini juga menolak beberapa temuan dari penelitian Lenny Mariana dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa hambatan teknis di BPKAD Kota Bekasi lebih disebabkan oleh masalah infrastruktur dan akses aplikasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah utama di Provinsi Lampung terletak pada kurangnya kompetensi teknis di kalangan SDM, yang menghambat kemampuan pegawai untuk memanfaatkan fitur-fitur SIPD dengan maksimal. Meskipun pelatihan telah dilakukan, banyak pegawai yang masih kesulitan mengoperasikan aplikasi, yang berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas SIPD.

Secara keseluruhan, temuan utama dari penelitian ini memperkuat pentingnya peningkatan pelatihan SDM, pengembangan infrastruktur, dan koordinasi antar OPD untuk mengatasi masalah sinkronisasi data. Temuan ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi antar unit pengelola keuangan dan pihak terkait untuk memastikan implementasi SIPD lebih efektif. Meskipun SIPD telah memberikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung, tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia masih perlu diatasi agar efektivitasnya dapat ditingkatkan lebih lanjut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi SIPD di Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun terdapat beberapa daerah yang masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan, secara umum SIPD telah berhasil mempercepat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang lebih akurat. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran penggunaan SIPD, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam mengoperasikan sistem ini secara optimal. Meskipun SIPD sudah diterapkan untuk menggantikan sistem manual, kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah, serta kurangnya pemahaman teknis di kalangan pegawai dan masyarakat, menghambat efektivitas penuh dari sistem ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di Provinsi Lampung antara lain pelatihan yang diberikan oleh BPKAD, dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah, serta kesadaran dan adaptasi masyarakat dan pegawai terhadap teknologi digital. Meskipun pelatihan sudah dilakukan secara rutin, masih ada beberapa pegawai yang kesulitan dalam mengoperasikan SIPD secara penuh, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui SIPD meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, serta pemantauan dan evaluasi sistem yang dilakukan secara rutin. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses teknologi di daerah-daerah terpencil dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini menyebabkan optimalisasi penerapan SIPD belum dapat tercapai sepenuhnya.

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang lingkup, yang hanya terfokus pada implementasi SIPD di Provinsi Lampung. Selain itu, informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yang membatasi generalisasi temuan penelitian ke daerah lain. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data tentang perbandingan implementasi SIPD di daerah dengan akses teknologi yang lebih baik, yang dapat memberikan perspektif berbeda terhadap tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah dengan kondisi serupa.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)** Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi penerapan SIPD di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda, khususnya di daerah dengan akses teknologi yang lebih baik. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SIPD dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang lebih efisien, serta penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan daerah.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan berharga dalam melaksanakan penelitian ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari BPKAD, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusi dan perhatian penuh selama proses implementasi SIPD, baik dalam hal pengumpulan data maupun dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk analisis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada seluruh informan, baik informan utama maupun pendukung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga, serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan SIPD di Provinsi Lampung. Tanpa kontribusi aktif dari para informan, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan material dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti dalam setiap langkah penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD, J., EKAYANTI, A., NONCI, N., & RAMADHAN, M. R. (2020). Government Agility and Management Information Systems: Study of Regional Government Financial Reports. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 315–322. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.315>
- Hendra, A., & Pradana, R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 122–134. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i1.3669>
- Kaul, M. (1987). Impact of information Technology in Government Systems: A Regional Overview of Asian Experiences. *Information Technology for Development*, 2(2), 97–131. <https://doi.org/10.1080/02681102.1987.9627090>
- Mariana, L. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, 11(2), 123–130.
- Nasution, D. A. D., & Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, (July), 669. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p26>
- Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Priskila, R., Setyohadi, D. B., & Santoso, A. J. (2018). An investigation of factors affecting the success of regional financial management information system (case study of Palangka Raya Government). *2018 International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI 2018*, (May), 253–258. <https://doi.org/10.1109/ISRITI.2018.8864479>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syuhada, F. F., Julian, C., & Iriani, A. (2024). Transformasi E-Government Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 12, 7–14.
- Teken, I. K. A., Romarina, A., & Korespondensi, P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar Penulis : Afiliasi : Email :, 4(2), 111–123.
- Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 143–157. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528>
- Utami, Y., & Tjenreng, M. B. Z. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 1(1), 106–120.
- Wihatmono, S. R., Suharman, H., & Daryanto. (2025). The Influence of Organizational Culture on the Government Internal Control System and its Impact on the Quality of Financial Information Systems in the Regional Revenue Agency of West Java Province. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 2140–2155. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6004>
- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>

